



INTI SARI

PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA WANITA TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA PADA PERUSAHAAN ASESORIS DAN RAMBUT PALSU DI KABUPATEN PURBALINGGA

Oleh :

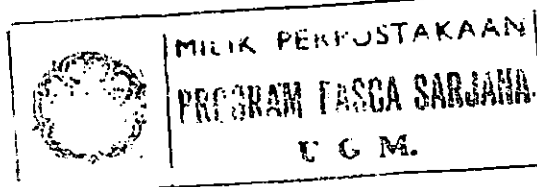
Prof. DR. R. M. Sudikno Mertokusumo, SH.*)
Sulistiyowati, SH. M.Hum**) Muhammad Luthfi

Penelitian tentang Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Wanita Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerja Pada Perusahaan Asesoris dan Rambut Palsu di Kabupaten Purbalingga dilakukan dengan tujuan untuk lebih mengetahui bagaimana perlindungan hukum tenaga kerja wanita terhadap pelaksanaan perjanjian kerja Perusahaan Asesoris dan Rambut Palsu.

Penelitian ini merupakan Penelitian Hukum Normatif dengan menggunakan metode deskriptif. Data Sekunder diperoleh melalui Studi Kepustakaan, didukung dengan Data Primer yang diperoleh dari lapangan dengan menggunakan kuisioner yang diberikan kepada responden, juga melakukan wawancara dengan nara sumber yang dipilih. Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis secara kualitatif.

Penelitian dilakukan pada Perusahaan Asesoris dan Rambut Palsu yang berada di wilayah Kabupaten Purbalingga, dengan dasar pertimbangan bahwa disamping Perusahaan Asesoris dan Rambut Palsu merupakan salah satu jenis usaha yang tergolong padat karya yang banyak menyerap tenaga kerja wanita yang berarti mendukung subyek penelitian, juga untuk menghemat waktu, tenaga dan biaya.

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui, bahwa perjanjian kerja yang diberlakukan di keempat Perusahaan Asesoris dan Rambut Palsu tersebut di atas, semuanya tidak dibuat sebagaimana mestinya. Perjanjian dibuat dengan tidak berpedoman pada perjanjian perburuhan yang berlaku di masing-masing perusahaan sebagai perjanjian induknya sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 butir (1), Pasal 9 butir (1) dan Pasal 10 Undang-Undang No. 21 tahun





1954, karena dibuat secara sederhana oleh pengusaha yang hanya mengatur mengenai masa percobaan dan peraturan tata tertib perusahaan saja. Ini dimulai dari pembuatan isi perjanjian kerja, sampai dengan pelaksanaannya dikarenakan masih lemahnya aparat Pemerintah (Pegawai Pengawas Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja) di dalam melaksanakan tugasnya, kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan baik dari pengusaha maupun dari tenaga kerja wanita juga karena kurangnya kesadaran dari pihak pengusaha akan tanggung jawabnya dan tidak berfungsinya UPK SPSI.

Dari uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa tenaga kerja wanita belum sepenuhnya memperoleh perlindungan sebagaimana mestinya.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja Wanita, Perjanjian Kerja, Perusahaan Asesoris dan Rambut Palsu, Kabupaten Purbalingga.

*) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

***) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada



ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR FEMALE WORKERS IN THE LABOUR CONTRACT IMPLEMENTATION IN THE ACCESSORIES AND WIG MANUFACTURING COMPANIES IN PURBALINGGA REGENCY

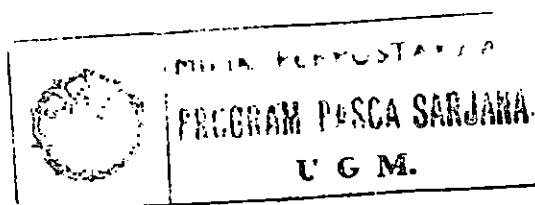
The research on legal protection for female workers in the implementation of an employment contract in the accessories and wig manufacturing companies in Purbalingga Regency is done based on the objective to find out more on how the legal protection for female workers is provided in the implementation of an employment contract in those companies.

This is juridical normative research which adopts a descriptive method. The secondary data were derived from a library study and supported with primary data from the questionnaires distributed to the respondent and the interview with resource persons in the field. The data were analyzed qualitatively.

The research located in the accessories and wig manufacturing companies in Purbalingga Regency considering not only that these companies are among the labour-intensive businesses that absorb female workers—the subjects of the research, but also that it is time, energy and cost saving.

The research findings show that the employment and labour contracts in those four companies were not made in the way they are supposed to be. The contract making did not follow the guideline of the labour contract they adopt, which is the major contract as regulated in the article 1 section 1, article 9, section 1 and article 10 of the laws no. 21/1954. This happened because the businessmen had simplified the contract by regulating only the approbation period and the rules for conduct. Similarly, the labour contract was made by not consistently basing on the guideline for a labour contract making set by the government.

Such incongruity begins from the formulation of the and labour contracts to the implementation. The cause are poor performance of the government apparatus (monitoring officials from the Demography and Labour Force office), poor understanding of both the employers and the workers





UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Perlindungan hukum tenaga kerja wanita di dalam pelaksanaan perjanjian kerja pada perusahaan asesoris dan rambut palsu di Kabupaten Purbalingga

LUTHFI, Muhammad, Prof.Dr. RM. Sudikno Mertokusumo, SH

Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

on the rules of law, as well as the lack employers' sense of responsibility and incapability of the UPK-SPSI (labour union) to meet the expected performance.

Keywords : Legal protection, female labours, labour contract, accessories and wig manufacturing companies, Purbalingga Regency.